

**Pengaruh American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) terhadap
Kebijakan Pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem di Era
Presiden Donald Trump**

**PENGARUH AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE (AIPAC)
TERHADAP KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM PEMINDAHAN
KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT UNTUK ISRAEL KE
YERUSALEM DI MASA KEPEMIMPINAN DONALD TRUMP**

Rana Qonita Rofila (20150510130)

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A.

Prodi Hubungan Internasional, Fakultas ISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia, 55184

ranaqonita@gmail.com

Abstract

This research aim to describe the American-Jewish interest group, AIPAC, which has a major influence on US foreign policy, specifically into Israel's interests. President Trump has since fully supported Israel, and promised Jerusalem's recognition as the capital of Israel, as well as moving the US embassy in Tel Aviv to Jerusalem. This was due to the influence of AIPAC since its inception, starting with Israel's recognition as a sovereign country until the publication of the Jerusalem Embassy Act in 1995. AIPAC had influences that the process of moving the embassy was running fast because it had been delayed since 1999.

Keywords: AIPAC, Jewish Lobby, Embassy, US, Israel

ABSTRAK

Dalam penelitian ini menjelaskan kelompok kepentingan Yahudi yaitu AIPAC yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat khususnya yang menguntungkan bagi Israel. Presiden Trump sejak masa kampanyenya mendukung penuh Israel, dan menjanjikan akan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel, sekaligus memindahkan kedutaan besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh AIPAC sejak awal, dimulai dari pengakuan Israel sebagai Negara berdaulat hingga diterbitkannya Jerusalem Embassy Act tahun 1995. AIPAC memberikan pengaruh agar proses perpindahan kedutaan tersebut berjalan cepat karena tertunda sejak tahun 1999.

Kata Kunci: AIPAC, Lobi Yahudi, Kedutaan Besar, Amerika Serikat, Israel

PENDAHULUAN

Amerika Serikat (AS) dengan Israel memiliki hubungan yang erat secara historis. Hubungan terus meningkat ketika masa kepemimpinan Presiden Reagan di tahun 1980-an. Pada 11 September 1922 senator dan kongres Amerika Serikat memberi dukungan pada berdirinya negara Israel diatas tanah Palestina. Terjadi juga Konferensi Zionis Internasional yang dilaksanakan di Hotel Baltimore, New York yang bertujuan untuk mengubah Palestina menjadi negara Yahudi dan mengusir warga Arab yang tinggal di Palestina pada 11 Mei 1942 (Sona, 2011). Hubungan ini terus beriringan hingga presiden selanjut-selanjutnya dilantik.

Kaum Yahudi memiliki peranan yang sangat besar bagi pertumbuhan Amerika Serikat (Setiowati, 2009). Kaum Yahudi menguasai industri-industri di Amerika Serikat maupun dunia, sekaligus bidang pemerintahan terkhusus Amerika Serikat melalui Kongres Amerika. Keterlibatan Yahudi dalam pemerintahan Amerika Serikat dikenal dengan sebutan lobi Yahudi. Salah satu kelompok kepentingan Yahudi yang memiliki pengaruh terbesar dalam pemerintahan Amerika Serikat yaitu AIPAC (*American Israel Public Affairs Committee*). AIPAC dibentuk pada tahun 1951 pada masa pemerintahan Presiden Eisenhower. AIPAC adalah sebuah kelompok kepentingan yahudi yang memusatkan kepentingannya kepada negara Israel agar setiap kebijakan Amerika Serikat tidak bertentangan dengan kepentingan negara Israel sebagai negara sekutu Amerika Serikat. Awalnya kelompok ini kurang begitu berkembang. Saat ini AIPAC telah menjadi kelompok kepentingan terkuat yang dapat mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan di Gedung Putih. Peran AIPAC sangat terlihat jelas dalam politik dan pemerintahan Amerika Serikat.

Selain mampu mempengaruhi anggota Kongres dan para Senator, AIPAC juga berperan penting dalam pemilihan umum di Amerika Serikat. Dalam setiap pemilihan umum, AIPAC akan mendukung kandidat yang dianggap memihak kepada negara zionis Israel. Dukungan AIPAC kepada kandidat yang akan terpilih dapat berupa dukungan dana kampanye maupun dukungan suara. Sebaliknya jika ada kandidat yang mengkritik Israel maka dapat dipastikan kandidat tersebut tidak dapat

maju ke langkah berikutnya (Zubir, 2011). AIPAC bergerak mulai dari departemen eksekutif negara hingga di kongresnya. Dengan anggota yang kini mencapai kurang lebih 100.000 orang yang tersebar di 17 kantor dan didukung oleh jaringan donor yang luas, AIPAC adalah salah satu grup lobi terkuat di Amerika Serikat. AIPAC mendapat dukungan cukup besar dari para politisi Yahudi di Partai Republik dan Partai Demokrat.

Saking kuatnya pengaruh AIPAC di kalangan politisi elit Amerika Serikat, dalam konferensi tahun lalu tak hanya Trump yang hadir, tapi juga Hillary Clinton, mantan Wakil Presiden Joe Biden, dan Ketua Dewan Legislatif, Paul Ryan. Dalam pelaksanaannya, anggota AIPAC bertemu secara rutin dengan anggota Kongres AS, biasanya dengan cara menyelenggarakan sebuah acara khusus, dan mengundang politisi yang akan dilobi-lobi. Jika lobi berhasil, si politisi diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi AIPAC di kongres hingga dapat menjadi sebuah undang-undang. Salah satu undang-undang penting yang sejumlah pengamat politik nilai sebagai keberhasilan penting bagi lobi AIPAC adalah terbitnya *Jerusalem Embassy Act* tahun 1995. Isinya memerintahkan pemerintahan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem paling lambat 31 Mei 1999. Pemerintah Amerika Serikat juga mesti membantu 50 persen dana pemindahan. Langkah ini adalah simbol dari pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel oleh pemerintah Amerika Serikat.

Menurut laporan *Fortune*, AIPAC terhubung secara longgar dengan Political Action Committee (PACs), organisasi yang berisi para kontributor dan pendonor dana untuk menggelar kampanye baik untuk mendukung maupun menentang pencalonan kandidat, inisiatif pemungutan suara dan undang-undang. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok yang memiliki upaya lobi menggunakan pelobi profesional yang mampu memberikan pengaruh kepada para pejabat Kongres AS untuk melindungi kepentingan Israel. Organisasi ini memiliki perwakilan di seluruh penjurur AS yang dapat melobi anggota Kongres dari distrik asal mereka. Anggota AIPAC adalah para pelobi yang terdiri dari politisi dan tokoh Yahudi untuk

memperkuat hubungan antara AS dan Israel, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan pemerintah Tel Aviv. AIPAC dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan donor yang bersedia menyumbangkan dananya untuk kampanye pencalonan, walaupun AIPAC tidak berkontribusi langsung terhadap pencalonan kandidat capres AS, dan tidak juga memberikan dana kepada PACs yang mendukung pencalonan masing-masing capres. Dalam siklus kampanye 2016 tercatat menurut data dari *Open Secrets* sebanyak US\$7.168.396 disumbangkan untuk kampanye federal dari sejumlah individu pro-Israel dan berbagai PACs. Sementara pada siklus kampanye 2012, sebanyak US\$15.102.201 disumbangkan dari kelompok tersebut. Menghadiri konferensi AIPAC dianggap sebagai hal yang penting bagi kandidat calon presiden AS (Sari, 2016).

Donald John Trump merupakan Presiden Amerika Serikat ke-45 menggantikan presiden yang dua periode menjabat yaitu Barrack Husein Obama. Dirinya resmi dilantik menjadi Presiden pada tanggal 20 Januari 2017. Sebelum menjadi Presiden, Trump sudah dikenal sebagai milyarder dan pebisnis real-estat. Semenjak masa kampanye berlangsung, Trump memang dikenal penuh kontroversi dibandingkan dengan saingannya kala itu, Hillary Clinton. Presiden Trump berasal dari partai Republik. Dalam janji kampanyenya, Trump sudah membuat pernyataan dukungan kepada pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibukota Israel “yang tak terbagi”. Disini dilihat bahwa ini merupakan kekuatan lobi dari pada kaum Yahudi terhadap Trump sangatlah berpengaruh (Hasan, 2017). Trump secara terbuka juga telah mengatakan bahwa dirinya mendukung 100 persen, sebagai salah satu bentuk komitmen hubungan baik antara Washington dan Israel (Kompas.com, 2017).

Pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem

Pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel telah berlangsung pada tanggal 14 Mei 2018. Kebijakan tersebut akhirnya terlaksana pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump. Awalnya kebijakan ini sudah lama dicanangkan sejak tahun 1990-an pada masa kepemimpinan Presiden Bill Clinton. Hingga akhirnya Kongres menerbitkan undang-undang Kedutaan Yerusalem

(*Jerusalem Embassy Act*) pada tahun 1995 yang isinya memerintahkan pemerintahan Amerika Serikat untuk memindahkan kantor Kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem sebelum tahun 1999. Namun pemindahan tersebut tertunda dari masa ke masa. Pemindahan kedutaan tersebut sebagai salah satu bentuk AS dalam mengakui kedaulatan Negara Israel. Hal ini sudah berlansung sejak 14 Mei 1948 kala pemerintahan Presiden Harry Truman yang mengumumkan jika pendirian negara Yahudi mengundang ikatan mendalam antara AS dengan orang-orang Yahudi. AS mengakui Israel sebagai negara merdeka di hari yang sama, dan menjadikannya sebagai Negara pertama yang melakukannya. Ikatan itu terus berjalan hingga 70 tahun setelahnya, Israel menjadi mitra AS yang paling dapat diandalkan di Timur Tengah, terikat oleh ikatan sejarah dan budaya, serta oleh kepentingan bersama.

Faktor yang Memengaruhi Rencana Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem

1. *Jerusalem Embassy Act 1995*

Pada tahun 1995, Kongres mengadopsi *Jerusalem Embassy Act* atau Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, untuk mendesak pemerintah federal untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota dari negara Israel dan memindahkan Kedutaan Amerika Serikat. Undang-undang tersebut juga menegaskan kembali hak-hak setiap negara yang berdaulat untuk menunjuk ibu kotanya sendiri (Share America, 2017). Pernyataan yang disampaikan dalam undang-undang ini adalah Yerusalem harus tetap menjadi kota yang tidak terbagi, dan hak-hak dari setiap kelompok etnis dan agama dilindungi. Status Kota Yerusalem harus diakui sebagai ibukota dari Negara Israel dan Kedutaan Besar AS di Israel harus didirikan di Israel selambat-lambatnya 31 Mei 1999. Undang-undang tersebut juga menjelaskan jika Pemerintah AS juga memberikan dana tidak lebih dari 50% yang dialokasikan ke Departemen Luar Negeri untuk tahun fiskal 1999 untuk “Akuisisi dan Pemeliharaan Bangunan di Luar Negeri” (*Acquisition and Maintenance of Buildings Abroad*) dapat dibwajibkan sampai Sekretaris Negara menentukan dan melaporkan kepada Kongres bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel resmi dibuka. Dana yang disahkan pada tahun

fiscal 1996 adalah tidak kurang dari \$ 25.000.000 untuk konstruksi dan biaya lain yang terkait dengan pendirian Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Sedangkan untuk tagun fiscal 1997 disediakan dana sebesar \$ 75.000.000.

2. Ambisi Presiden Donald Trump

Menurut pernyataan President Trump, dirinya menandatangani dokumen penudaan pada tanggal 1 Juni 2017 tersebut dengan tujuan untuk kepentingan negosiasi perdamaian antara Palestina-Israel. Namun dirinya berulang kali akan tetap memindahkan kedutaan ersebut, hanya menunggu waktu yang tepat saja (The White House, 2017). Presiden Trump dalam pidatonya pada taggal 6 Januari 2017 menerangkan jika Lebih dari 20 tahun lamanya, presiden-presiden AS sebelumnya telah menjalankan “pengabaian” hukum, yang memungkinkan AS menunda pemindahan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Trump menjelaskan jika presiden mengeluarkan keringanan ini dengan keyakinan bahwa menunda pengakuan Yerusalem akan memajukan tujuan perdamaian. Sedangkan baginya para presiden tersebut membuat penilaian itu berdasarkan fakta yang mereka pahami kala itu. Setelah lebih dari 20 tahun pengabaian, Presiden Trump juga menjelaskan jika Amerika belum mencapai keputusan untuk perjanjian perdamaian abadi antara Israel dengan Palestina.

Dalam keterangan press Gedung Putih, Presiden Trump mengakui bahwa Yerusalem berperan sebagai ibukota dari Israel. Presiden Trump memenuhi janjinya dengan mengakui ibukota Israel yaitu Yerusalem dan membuka Kedutaan Besar AS disana. Pada 6 Desember 2017, Presiden Trump memberikan keterangan bahwa Amerika Serikat akan mulai menakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan secara resmi membuka kedutaan Besar AS di Yerusalem. Kongres juga memberikan desakan kepada Presiden untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel berdasarkan Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem (Jerusalem Embassy Act) 1995 yang bersifat bipartisan – seruan suara bulat yang ditegaskan kembali pada

senat tahun 2017 yaitu H.R.257 — 115th Congress (2017-2018), *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*.

Pemerintahan Trump menila jika pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota merupakan langkah yang baik untuk perdamaian antara Israel dan Palestina. Pengakuan tersebut bukan mengartikan AS memutuskan status akhir dari perdamaian tersebut. Setelah mengumumkan pengakuan ibu kota tersebut, Presiden Trump dengan cepat dan efisien membuka Kedutaan Besar di Israel dengan biaya rendah untuk membayar pajak. Kedutaan tersebut dibangun dalam waktu enam bulan dengan biaya \$ 400.000 dengan bantuan staf diplomatic AS untuk memastikan jika Kedutaan Besar siap dibuka pada 14 Mei 2018. Pemerintahan Trump telah memperbaharui semua peta Pemerintahan Federal untuk mencerminkan status Yerusalem sebagai ibukota Israel dibawah kebijakan Amerika. Dalam rangka merayakan pembukaan tersebut, Pemerintahan Trump mengirim delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Wakil Sekretaris Negara John Sullivan dan termasuk Sekretaris Pembendaharaan Steven Mnuchin, Penasihat Senior Jared Kushner, Penasihat Senior Ivanka Trump, dan Perwakilan Khusus untuk Negosiasi Internasional Jason Greenblatt (The White House, 2018).

3. Desakan dari Kongres AS

Pada tahun 2017 Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) H.R.257 – *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, 115th Congress (2017-2018). RUU ini disponsori oleh Representatif Trent Franks dari pantai Republikan . bill ini dikeluarkan dalam komite Luar Negeri. Dalam keterangannya dijelaskan RUU ini sudah diperkenalkan pada 1 April 2017 yang menjelaskan tentang kebijakan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi (US Congress, 2017).

RUU ini mengungkapkan bahwa kongres:

1. AS harus mengakui status kedaulatan Yerusalem yang tidak terbagi sebagai ibukota Israel,
2. Mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem dari Tel Aviv sebagai pertanda komitmen pemerintahan AS untuk Israel,
3. Presiden dan Departemen Luar Negeri harus meegakkan kebijakan AS bahwa Yerusalem harus tetap menjadi ibukota yang tak terbagi,
4. Presiden harus menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 (Jerusalem Embassy Act of 1995) dan memulai proses memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, dan
5. Pejabat AS harus menahan diri dari tindakan yang bertentangan dengan hukum AS tentang hal ini.

RUU ini juga menjelaskan bahwa dokumen resmi pemerintahan AS apapun yang mencantumkan Negara dan ibukota mereka harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden akan merelokasi Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem pada tanggal 1 Januari 2019. Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 diamandemen untuk menghilangkan wewenang presiden, efektif 1 Januari 2018, untuk mengesampingkan batasan dana tertentu ntuk akuisisi dan pemeliharaan gedung Departemen Luar Negeri di luar negeri sampai Kedutaan Besar AS di Yerusalem resmi dibuka.

Dijelaskan lebih lanjut, RUU in menerangkan kembali pada awal Israel berdiri 14 Mei tahun 1948 setelah Perang Dunia II sebagai tanah perlindungan umat Yahudi. Pada tanggal 31 Juli 1988, Jordan melepaskan klaim kedaulatannya yang disengketakan ke Ydea dan Samaria, dan Yerusalem Timur, dan oleh karena itu klaim berdaulat untuk daera-daeran ini tetap “diperdebatkan”, bukan “diududki”. Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal berlakunya Undang-undang ini, Sekretaris Negara harus menyerahkan kepada kongres laporan yang merincikan rencana departemen luar negeri ntuk menerapkan UU ini termasuk perkiraan tanggal penyelesaian (identifikasi situs, pembebasan lahan, survey arsitektur, tekni, dan konstruksi,

persiapan lokasi), dan perkiraan dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan UU ini, termasuk biaya yang berkaitan dengan pendirian Kedutaan Besar AS di Yerusalem. RUU ini disponsori oleh 36 anggota kongres.

Senat AS juga mengajukan RUU S.11 - *Jerusalem Embassy and Recognition Act*, disponsor oleh Senator Dean Heller pada 3 Januari 2017 terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel baik secara de facto maupun de jure dan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem. RUU ini menjelaskan jika:

1. Presiden dan Sekretaris Negara secara terbuka menegaskan kebijakan AS bahwa Yerusalem adalah kota yang tidak terbagi;
2. Presiden harus segera mengimplementasikan ketentuan-ketentuan UU Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 dan memulai proses relokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel ke Yerusalem;
3. Pejabat AS harus menghindari segala tindakan yang bertentangan dengan hukum AS tentang hal ini; dan
4. Dokumen resmi apapun dari Pemerintah AS yang mencantumkan Negara dan ibu kotanya harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

UU Kedutaan Besar Yerusalem juga dimandemen dimana bagian 7 dihilangkan dan bagian 8 diganti menjadi bagian 7 (US Congress, 2017). Kongres juga mengeluarkan RUU H.R.4718 - *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, disponsor oleh Ron DeSantis pada 21 Desember 2017 terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel jika relokasi Kedutaan tersebut harus dilakkan tidak lebih dari 1 Januari 2019.

Faktor Penghambat Berlangsungnya Kebijakan Pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem

Presiden-presiden sebelumnya beranggapan bahwa kebijakan ini dinilai bertentangan dengan kebijakan yang sudah ada selama puluhan tahun yang lalu. Hal

ini juga dikecam karena dapat memperburuk hubungan dengan sekutu Arab dan telah mempersulit upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian antara Israel-Palestina yang lama terhenti (Marniati K. D., 2018). Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu menganggap Iran masih merupakan musuh dari AS dengan Israel. Perwakilan AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan saat berpidato di Konferensi Tahunan AIPAC 2018 bahwa akan terus membela Israel di PBB. Menurutnya PBB sudah lama bersikap diskriminatif terhadap Israel dan merusak perdamaian dengan mendorong Israel akan segera pergi.

Presiden Donald Trump melakukan penundaan pada 1 Juni 2017 karena ingin merundingkan terlebih dahulu kesepakatan antara Israel dan Palestina, demi keamanan nasional Amerika Serikat (The White House, 2017). Dalam keterangan press dari gedung Putih menyatakan jika Trump tidak akan mengingkari janjinya, hanya saja menunggu waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Friedman, yang bekerja sebagai pengacara untuk Trump, mendorong agar pemindahan kedutaan dilakukan tahun ini, dan penasihat senior Trump, Jared Kushner, yang menjadi mediator perdamaian Timur Tengah juga mendukungnya. Tapi Tillerson mengajukan petisi kepada Trump dalam sebuah pertemuan pada Kamis. Ia meminta lebih banyak waktu untuk meningkatkan keamanan gedung, dan Presiden menyetujuinya. "Apa yang akan Anda lihat dari Menlu adalah bahwa kita akan melakukan ini dengan kecepatan keamanan, bukan pada laju politik," kata Pejabat Kemenlu untuk diplomasi dan urusan publik, Steven Goldstein.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diberi batasan waktu dimulai pada tahun 2016 terhitung masa Presiden Trump masih kampanye hingga diresmikannya kedutaan besar AS untuk Israel tahun 2018. Pengumpulan data sekunder dan bermetode kualitatif.

KERANGKA TEORI

Konsep Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

Kelompok penekan atau dalam nama lainnya biasa disebut sebagai *political advocacy group*, *special-interest group*, *interest group*, atau *lobbyist group*. Menurut Gabriel Almond mendefinisikannya sebagai organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok penekan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui kepentingan masyarakat umum dan masyarakat luas dengan harap pemerintah menyusun kebijakan yang memihak kepada kelompoknya. Kelompok penekan terinstitusionalisasi dan lebih politis dalam menyuarakan kepentingannya, fokus pada satu isu saja, serta memiliki kepedulian terhadap isu-isu tertentu (McNair, 1999:9). Kelompok penekan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi, bahkan lebih berpengaruh dalam mengambil keputusan daripada institusi pengambil keputusan formal (resmi). Dalam mempergunakan pengaruh politiknya, kelompok penekan mempergunakan tiga sumber kekuatan yaitu kekuatan finansial, jumlah anggota, dan pengetahuan. Sedangkan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara mobilisasi opini publik, kampanye, dan promosi, menyokong kandidat-kandidat calon politik, mempublikasi opini-opini, dan mensponsori pertemuan testimonial dengan makan malam.

Konsep Lobi (*Lobbying*)

Menurut Anthony J. Nownes dalam bukunya “Total Lobbying, What Lobbyists Want (And How They Try To Get It)”, lobi adalah sebuah usaha untuk memengaruhi pemerintah (Nownes, 2016). Orang yang melakukan lobi disebut lobbyist. Buku ini menjelaskan beberapa teknik lobi yang biasa dilakukan di Amerika Serikat, diantaranya: Legislative Lobbying, Executive Lobbying, Judicial Lobbying, Grassroot atau Indirect Lobbying, Electoral Lobbying, dan Join Coalition Lobbying.

HASIL DAN ANALISIS

Lobi dan Kepentingan AIPAC terhadap Pemerintahan AS dalam Kebijakan Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem

1. Hubungan Presiden Donald Trump dengan AIPAC

Semenjak masa kampanye, Trump memberikan beberapa contoh dukungannya terhadap Israel saat masa-masa kampanye. Dia juga menambahkan jika putrinya, Ivanka, akan segera melahirkan anak dari hasil pernikahannya dengan pengusaha Yahudi, Jared Kushner. Selain itu Trump mengaku pernah mengikuti parade "Salute to Israel" pada 2004 di New York, di tengah bentrokan antara Israel dan Palestina. Trump menilai PBB "lemah dan tidak kompeten" dalam hal konflik Israel-Palestina. Jikaterpilih sebagai presiden AS, Trump akan memveto seluruh upaya PBB untuk menekan Israel. Trump juga mendapat atensi saat mengatakan akan memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia juga mengaku mengenal Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan mengatakan bisa bekerja sama untuk membawa stabilitas dan perdamaian dengan perdana menteri Israel itu (Armandhanu, 2016).

Hubungan Trump dengan AIPAC berjalan saat Konferensi Tahunan AIPAC berlangsung di tahun 2016. Pidatonya yang kontroversial tersebut berhasil meraih simpati massa untuk AIPAC terkhususnya. Sepat terjadi pergolakan antara AIPAC dengan Trump karena dinilai ucapan Trump dapat memicu kekerasan dan rasisme. AIPAC sempat menegur Trump dan audiensnya. Namun Trump menerangkan dirinya sudah melakukan yang seharusnya dilakukan oleh kandidat lain (Plitnick, 2016). Berkat pidato Trump kala itu menjadi keuntungan sekaligus perdebatan didalam AIPAC, namun karena antusiasme para penonton dari Konferensi tersebut menjadikan AIPAC memiliki dukungan kuat.

a. Lobi AIPAC pada Presiden Donald Trump

AIPAC mengadakan konferensi yaitu The Annual Policy Conference tiap tahunnya di Washington D.C. Pada tahun 2016, AIPAC mengadakan konferensi tersebut yang dihadiri oleh Donald Trump, Hillary Clinton, dan Joe Biden ketika

mash mencalonkan diri menjadi presiden. Saat mencalonkan diri sebagai presiden, Trump berpidato di Konferensi AIPAC dan menyatakan bahwa dirinya mendukung Israel 100% dan ingin menepati janji yang tidak terlaksana oleh presiden-presiden sebelumnya. AIPAC menerangkan bahwa mereka senantiasa mendukung para kandidat politik yang mendukung kepentingan Israel, baik secara finansial maupun bantuan lainnya. Konferensi Tahunan merupakan bentuk lobi langsung yang dilakukan oleh AIPAC kepada para kandidat presiden maupun petinggi politik yang dating di acara tersebut. Jika para kandidat presiden menyatakan mendukung Israel maka akan diberikan kemudahan dalam pemilu berupa bantuan dana maupun dukungan suara. Dalam siklus kampanye di tahun 2016, *Fortune* memberikan laporan bahwa terdapat dana \$ 7.168.396 yang telah disumbangkan ke kampanye federal oleh individu dan PAC Pro-Israel, berdasarkan data *Open Secrets* (Geier, 2016).

Dalam acara The Annual Policy Conference tahun 2017 pun terlaksana kembali, namun Trump diwakili oleh Wakil Presiden Mike Pence. Trump kala itu sedang menghadapi penurunan tingkat penerimaan dan kritik dalam isu imigrasi dan tariff. Ada tekanan dari AIPAC yang menyegerakan pemindahan kedutaan bear yang dirilis oleh AIPAC kepada presiden. Keputusan Trump tersebut menjadi contoh sebuah tindakan dari kelompok kepentingan dapat mendorong kebijakan. Donor yang diberikan kepada Partai Republik juga memiliki dampak besar pada RUU untuk kongres, mereka memberikan tekanan langsung pada Presiden AS untuk mengubah kebijakan AS untuk Israel. Salah satu pendonornya adalah raja kasino Sheldon Adelson dan istrinya Miriam, memberikan donor individu kepada Republik sebesar \$83 juta. Pemindahan kedutaan besar menjadi tujuan pasangan tersebut sejak lama. Pasangan tersebut diundang makan malam pribadi di Gedung Putih pada 2 Oktober 2017, membahas tentang penembakan yang terjadi di Las Vegas, juga sekaligus mendorong Trump untuk memindahkan kedutaan dengan segera (Timmons, 2017).

Dalam *Press Release* yang dikeluarkan AIPAC pada 6 Desember 2017 dengan tajuk “*AIPAC Statement on President Trump's Jerusalem Announcement*”, menerangkan jika AIPAC mendukung AS atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu

kota dari Israel dan mendorong Presiden Trump untuk memulai relokasi kedutaan AS di sana. Keterangan pres tersebut juga menjelaskan bahwa AIPAC sangat mendukung pengesahan undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem yang diadopsi oleh kongres (AIPAC, 2017).

“...Today's action by President Trump is an important, historic step for which we are grateful. We urge the president to quickly relocate our embassy to Israel's capital.” – AIPAC

b. Reaksi Presiden Donald Trump terhadap Lobi AIPAC

Presiden Trump sejak sebelum menjadi presiden sangat mendukung keberadaan Israel. Dirinya memiliki darah Yahudi, dan anaknya Ivanka Trump juga menikahi seorang Yahudi dan akan melahirkan seorang bayi berketurunan Yahudi. Presiden Trump melihat fenomena yang terjadi terutama pada masa kepemimpinan Obama sebelumnya dan Sekretaris Negara kala itu Hillary Clinton. Dirinya menganggap perlakuan Presiden Obama dan Hillary Clinton pada Israel buruk. Hal tersebut dijelaskan Trump pada masa kampanye di Konferensi tahunan AIPAC tahun 2016 (Begley, 2016). Ambisi yang dimiliki Trump tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk memenuhi dari keinginan AIPAC. Pada dasarnya, AIPAC akan memberikan dukungan penuh kepada kandidat politik yang mendukung Israel. Terwujudnya pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem menandakan keberhasilan AIPAC dalam memberikan pengaruhnya pada Presiden Trump. Banyak kecaman datang dari berbagai Negara tidak mengurungkan niat Trump untuk tetap memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Selain karena ambisi dari awal masa kampanye, dorongan-dorongan dari individu maupun kelompok lain sudah lebih meyakinkannya. Trump akhirnya resmi mengumumkan pada 6 Desember 2017 membuat deklarasi untuk ingin memindahkan kedutaan besar tersebut.

Hubungan Kongres dengan AIPAC

Kongres adalah lembaga penting dalam pemerintahan AS karena seluruh kebijakan dihasilkan dari kongres. AIPAC sudah menjalin hubungan dengan Kongres

sejak lama. Setiap anggota Kongres mengenal AIPAC sebagai kelompok yang handal dalam melakukan lobi untuk memengaruhi kebijakan, terkhusus yang bersangkutan dengan Israel. Hubungan antara Kongres dengan AIPAC berlangsung semenjak anggota kongres menjadi kandidat, baik dari Partai Democrat maupun Republic. AIPAC mengadakan pertemuan pada setiap kandidat yang ingin mencalonkan jadi anggota kongres. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang para calon kandidat anggota kongres pada sikap mereka terhadap Israel. AIPAC akan mencari tahu calon kandidat mana saja yang akan mereka dukung ketika kampanye. Dukungan tersebut dengan cara mengarahkan calon-calon kandidat kepada para individu atau kelompok Yahudi di AS atau PACs pro-Israel. Dana dari PACs pro-Israel dapat digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye di seluruh televise nasional AS. Media massa milik Yahudi yang dibawah naungan AIPAC juga memberikan kesempatan untuk para kandidat tersebut berkampanye.

1. Lobi AIPAC terhadap Kongres

Bentuk lobi yang dilakukan AIPAC pada Kongres dapat dilihat pada individu-individu anggota kongres yang bersikukuh membela kepentingan Israel. Pembelaan tersebut berlatar belakangkan para anggota kongres yang melakukan balas budi pada AIPAC berkat dukungan dana dari PACs pro Israel yang diberikan ketika kampanye. AIPAC juga memberikan penghargaan bagi para anggota kongres yang memerjuangkan kepentingan Israel di kongres (Mearsheimer & Walt, 2010). Salah satu pengharganya berupa perjalanan mengunjungi Israel dan kesiapan AIPAC dalam membanntu kandidat dalam pemilihan selanjutnya.

Jika kongres membahas mengenai Israel rata-rata sikap para anggota kongres memilih diam dan tidak ada kritik tajam terkait dengan kebijakan AS terhadap Israel. Penyebabnya adalah para anggota kongres menyadari jika kritik tersebut akan berbahaya dan menyusahkan jabatan mereka. Jika ada anggota kongres yang memberi kritik terhadap kebijakan AS terhadap Israel, maka mereka akan ditentang oleh simpatisan Yahudi melalui surat elektronik dan dituduh antisemit. Anggota-anggota kongres lebih memilih mendukung kebijakan terhadap Israel daripada menolaknya.

Anggota-anggota tersebut ialah Juru Bicara DPR Paul Ryan dari Partai Republik WI, *House Majority Leader Kevin McCarthy* dari Partai Republik CA, *House Majority Whip Steve Scalise* dari partai Republik LA, *House Minority Whip Steny Hoyer* dari Partai Demokrat MD, *Senate Foreign Relations Committee Chairman Bob Corker* dari Partai Republik TN, *House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce* dari Partai Republik CA, *House Foreign Affairs Committee Ranking Member Eliot Engel* dari Partai Demokrat NY, dan para anggota senat kongres lainnya yang didominasi berasal dari Partai Republik (The White House, 2017).

Kongres juga melakukan kunjungan ke Israel pada tahun 2017. Sekitar 53 anggota mengunjungi Israel. Acara tersebut difasilitasi oleh *the American Israel Education Foundation (AIEF)* yang berafiliasi langsung oleh AIPAC. Tujuan kunjungan tersebut yaitu memberikan pengetahuan langsung tentang hubungan AS-Israel dan masalah-masalah kritis yang dialami para pembuat kebijakan Amerika di Timur Tengah. Para anggota diberikan pengarahan tentang isu yang berkaitan dengan ancaman strategis di kawasan ini dan bagaimana peristiwa tersebut dapat memengaruhi Timur Tengah. Para anggota kongres bertemu pemimpin politik Osrail dan Palestina, serta para pejabat keamanan Israel, akademisi, dan perwakilan media. Kelompok kongres juga mengunjungi lokasi bersejarah dan strategis di Israel, termasuk perbatasan Negara Yahudi dengan Libanon, Yordania dan Suriah. Kegiatan ini dipimpin oleh *House Majority Leader Rep. Kevin McCarthy (R-Calif.)* dan *Democratic Whip Rep. Steny Hoyer (D-Md.)* (The Algemener, 2017).

2. Reaksi Kongres terhaap Lobi AIPAC

AIPAC berhasil memengaruhi kongres untuk rencana pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem. Pada tahun 2017 Kongres Amerika Serikat memberikan reaksi terhadap lobi AIPAC yaitu berupa mengeluarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) H.R.257 – *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, 115th Congress (2017-2018). RUU ini disponsori oleh Representatif Trent Franks dari pantai Republikan. Bill ini dikeluarkan dalam komite Luar Negeri. Dalam keterangannya dijelaskan RUU ini sudah diperkenalkan pada 1 April 2017 yang

menjelaskan tentang kebijakan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi (US Congress, 2017).

RUU ini juga menjelaskan bahwa dokumen resmi pemerintahan AS apapun yang mencantumkan Negara dan ibukota mereka harus mengidentifikasi Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Presiden akan merelokasi Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem pada tanggal 1 Januari 2019. Undang-undang Kedutaan Besar Yerusalem tahun 1995 diamandemen untuk menghilangkan wewenang presiden, efektif 1 Januari 2018, untuk mengesampingkan batasan dana tertentu untuk akuisisi dan pemeliharaan gedung Departemen Luar Negeri di luar negeri sampai Kedutaan Besar AS di Yerusalem resmi dibuka. RUU ini disponsori oleh 36 anggota kongres. Senat mengeluarkan RUU S.Res.167 - *A resolution relating to the recognition of Jerusalem as the capital of Israel and the relocation of the United States Embassy to Jerusalem* pada 17 Mei 2017 yang menjelaskan terkait pemerintah AS harus mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi dan juga kedutaan besar AS harus di relokasi di Yerusalem (US Congress, 2017)

Senat AS juga mengajukan RUU S.11 - *Jerusalem Embassy and Recognition Act*, disponsor oleh Senator Dean Heller pada 3 Januari 2017 terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel baik secara de facto maupun de jure dan pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke Yerusalem.

UU Kedutaan Besar Yerusalem juga diamandemen dimana bagian 7 dihilangkan dan bagian 8 diganti menjadi bagian 7 (US Congress, 2017). Kongres juga mengeluarkan RUU H.R.4718 - *Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*, disponsor oleh Ron DeSantis pada 21 Desember 2017 terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel jika relokasi Kedutaan tersebut harus dilaksanakan tidak lebih dari 1 Januari 2019. Ada pula Kongres mengeluarkan RUU H.Con.Res.11 - *Expressing the sense of Congress that Jerusalem is the capital of Israel and therefore, consistent with the location of other United States embassies, the United States embassy in Israel should be located in Jerusalem* yang

mengungkapkan bahwa pemerintah AS harus secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan kedutaan AS di Israel harus berlokasi di Yerusalem (Congress.gov, 2017).

Kontrol AIPAC pada Media Massa terkait Kebijakan Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem

1. Kontrol AIPAC terhadap Media Massa

AIPAC mengontrol media melalui tekanan pada media tersebut. Penekanan ini dilakukan pada media yang dimiliki oleh Amerika keturunan yahudi maupun non-Yahudi dengan cara memberikan gelar antisemit pada media yang melanggar ketentuan yang ada. Banyak media AS yang jarang menuai kritik terhadap AIPAC, kebijakan AS terhadap Israel, maupun tentang peristiwa lain yang berhubungan dengan Israel. Akan ada sanksi berupa unjuk rasa, penulisan surat, ataupun boikot yang diberikan kepada media yang berani mengkritik dan menerbitkan berita yang menurut mereka anti-Israel. Sanksi yang paling berat bias sampai membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik (Mearsheimer & Walt, 2010). Salah satu contoh kasusnya adalah seorang jurnalis Michael Massing yang mendapat informasi dari seorang koresponden bahwa surat kabar takut pada AIPAC dan kelompok-kelompok pro-Israel lainnya yang terus memberikan tekanan pada mereka. Salah satunya adalah seorang eksekutif CNN menerima enam ribu surel (*e-mail*) dalam satu hari, bahwa sebuah artikel anti-Israel dan surat-surat kabar seperti *New York Times*, *Philadelphia Inquirer*, *Washington Post*, *Chicago Sun*, *Los Angeles Times*, dan *Miami Herald* pernah menghadapi boikot oleh pelanggannya akibat pemberitaan yang memojokan Israel di Timur-Tengah (Zubir, 2011).

Disamping itu, AIPAC memiliki lembaga pengawas pemberitaan media massa AS yang bernama *Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America* (CAMERA). Lembaga tersebut akan mengirimkan teguran kepada pimpinan media massa yang memojokkan Yahudi dan mengkritik kebijakan AS terhadap Israel berupa surat elektronik. Hal tersebut pernah terjadi pada National Public Radio dan

stasion radio umum WBUR di Boston yang kehilangan dana sumbangan senilai lebih dari satu juta dollar akibat kampanye yang dilakukan CAMERA dalam meyakinkan para penyumbang untuk menghentikan dukungannya karena pemberitaannya tidak berpihak pada Israel (Mearsheimer & Walt, 2010). Akibat dari bentuk control tersebut membuat public AS pada umumnya tidak mengetahui berita yang sebenarnya, sekaligus membuat kritik terhadap pemerintah mengenai lobi dari AIPAC dan hubungan AS dengan Israel jarang menjadi perbincangan debat dalam masyarakat AS.

2. Reaksi Media Massa terhadap Kontrol Berita terkait Kebijakan Pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem

Berdasarkan hasil pengawasan media massa tersebut, salah satu media massa yang dulunya pernah di boikot AIPAC yaitu *The Washington Post* membuat sebuah postingan yang diterbitkan tanggal 8 Mei 2018 yang menjelaskan tentang apa yang orang-orang selama ini salah persepsikan terhadap kebijakan pemindahan kedutaan besar tersebut (Shapiro, 2018). Artikel tersebut ditulis oleh Daniel B. Shapiro, yaitu Duta Besar AS untuk Israel. CAMERA juga melakukan control terhadap pemberitaan pemindahan kedutaan besar yang dilakukan oleh *New York Times*. Artikel tersebut awalnya mengklaim bahwa kedutaan tersebut berlokasi di Yerusalem Timur: “Kedutaan tersebut sebagian besar di Yerusalem Barat yang didominasi Yahudi dan sebagian lagi di Yerusalem Timur yang sebagian besar Arab.”. Namun faktanya kompleks kedutaan tersebut terletak sebagian di Yerusalem Barat yang berada di bawah kedaulatan Israel sejak 1949 dan sebagian di zona demiliterisasi yang terletak antara Yerusalem Israel dulu dan beberapa bagian kota yang ditempati Jordan. CAMERA langsung menghubungi pihak *New York Times* hingga akhirnya berhasil diperbaiki menjadi yang seharusnya (CAMERA, 2018).

KESIMPULAN

Amerika Serikat dengan Israel adalah Negara sekutu terkuat yang pernah ada. Pengaruh yang diberikan Yahudi memberikan peran besar untuk kemajuan Negara

AS. AIPAC adalah kelompok penekan yang memiliki pengaruh besar untuk politik AS, khususnya terkait kebijakan yang bisa menguntungkan untuk Israel. Lobi yang dilakukan AIPAC dapat berupa lobi secara personal kepada pejabat politik, anggota kongres, bahkan media massa. Pada tahun 1995, Kongres mengadopsi *Jerusalem Embassy Act* atau Undang-Undang Kedutaan Yerusalem, untuk mendesak pemerintah federal untuk mengakui Jerusalem sebagai ibukota dari negara Israel dan memindahkan Kedutaan Amerika Serikat. Undang-undang tersebut juga menegaskan kembali hak-hak setiap negara yang berdaulat untuk menunjuk ibu kotanya sendiri. Undang-undang tersebut merupakan hasil lobi dari AIPAC. Namun pemindahan kedutaan besar tersebut belum berhasil dari awal undang-undang tersebut terbit. Hingga akhirnya pada masa kepemimpinan Presiden rump kebijakan tersebut berhasil terwujud. Analisis yang dimiliki mengapa hal tersebut terjadi adalah karena AIPAC memengaruhi Trump secara personal bahkan saat dirinya masih berkampanye, hingga aliran-aliran dana untuk partai Republik. Kongres juga merasakan tawaran baik yang diberikan AIPAC berupa perjalanan ke Israel sebagai bentuk pengetahuan bagi anggota Kongres akan keadaan Israel. Begitupun media massa, AIPAC menekan dalam media massanya yang mendorong Trump untuk segera memindahkan kedutaan besar tersebut, juga memberikan pengawasan terhadap media massa yang memberitakan tentang kebijakan itu.

REFERENSI

- AIPAC. (2017, Desember 8). *AIPAC Statement on President Trump's Jerusalem Announcement*. Retrieved Juli 9, 2019, from AIPAC:
<https://www.aipac.org/resources/aipac-publications/publication?pubpath=PolicyPolitics/Press/AIPAC%20Statements/2017/12/Jerusalem%20announcement>
- AIPAC. (2019). *How We Work*. Dipetik Maret 13, 2019, dari AIPAC:
<https://www.aipac.org/about/how-we-work>
- Ariani, Y. (2013, Oktober 11). *Peran United Nations Melalui Conventions on The Rights of The Child (CRC) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Terhadap Pemberlakuan Mandatory Minimum Sentencing Law di Northern Territory, Australia. Dipetik Maret 4, 2019, dari UMM Institutional Repository: <http://eprints.umm.ac.id/25550/>

- Armandhanu, D. (2016, Maret 22). *Di Hadapan Pelobi Yahudi, Donald Trump Mengaku Sahabat Israel.* Dipetik Februari 6, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160322131147-134-119027/di-hadapan-pelobi-yahudi-donald-trump-mengaku-sahabat-israel?>
- Arovati, D. (2005, Mei 15). *Perbandingan Strategi George Walker Bush Dalam Pemilu Amerika Serikat Tahun 2000 dan 2004.* Retrieved Oktober 17, 2017, from Repository UMY: <http://thesis.umi.ac.id/temp/17101727ab6da54ce53defea911a680dabc68a4.pdf>
- BBC. (2017, Desember 8). *Apa yang mendasari pengakuan Trump atas Yerusalem? Tujuh hal yang harus Anda ketahui.* Dipetik April 11, 2019, dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-42276374>
- BBC. (2017, Juni 4). *Trump tunda pemindahan kedutaan di Israel ke Yerusalem.* Dipetik Juni 4, 2019, dari BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40148195>
- Begley, S. (2016, Maret 21). *Read Donald Trump's Speech to AIPAC.* Retrieved Juli 9, 2019, from TIME: <https://time.com/4267058/donald-trump-aipac-speech-transcript/>
- Bimbie.com. (2015). *Bimbie.com.* Dipetik April 25, 2018, dari Sejarah Hubungan Amerika dan Israel: <http://www.bimbie.com/sejarah-hubungan-amerika-dan-israel.htm>
- CAMERA. (2018, Mei 14). *CAMERA PROMPTS NY TIMES UPDATE ON US EMBASSY LOCATION.* Dipetik Juli 9, 2019, dari CAMERA: <https://www.camera.org/article/camera-prompts-ny-times-update-on-us-embassy-location/>
- Cipto, B. (2003). *Politik dan Pemerintahan Amerika.* Dalam B. Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika.* Yogyakarta: Lingkaran.
- CNN Indonesia. (2018, Februari 24). *Amerika Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem pada Mei, HUT Israel.* Dipetik Februari 5, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180224072424-120-278512/amerika-pindahkan-kedutaan-ke-yerusalem-pada-mei-hut-israel>
- Congress.gov. (2017). *H.Con.Res.11 - Expressing the sense of Congress that Jerusalem is the capital of Israel and therefore, consistent with the location of other United States embassies, the United States embassy in Israel should be located in Jerusalem.* Retrieved Juli 9, 2019, from Congress.gov: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-concurrent-resolution/11?q=%7B%22search%22%3A%5B%22embassy%22%5D%7D&r=2>

- Deutsche Welle. (2017, Desember 6). *Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem Bisa Berakibat Fatal*. Dipetik Februari 5, 2019, dari Deutsche Welle: <https://www.dw.com/id/pemindahan-kedubes-as-ke-yerusalem-bisa-berakibat-fatal/a-41669288>
- Dictio. (2017, Oktober 1). *Dictio*. Dipetik April 25, 2018, dari Apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan (interest group)?: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kelompok-kepentingan-interest-group/12996>
- Freedman, L. (2000). *Power and Politics in America*. In L. Freedman, *Power and Politics in America* (p. 71). San Diego: Harcourt College Publishers.
- Geier, B. (2016, Maret 21). *Here's Why AIPAC and the Israel Lobby Will Be Critical to 2016 Elections*. Dipetik Juli 15, 2019, dari Fortune: <https://fortune.com/2016/03/21/aipac-israel-lobby-election-2016/>
- Haryanto, A. (2014). PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 19-21.
- Hasan, A. M. (2017, Desember 12). *Lobi Grup Zionis AS di Balik Keputusan Trump soal Yerusalem*. Retrieved Mei 24, 2018, from Tirto.id: <https://tirto.id/lobi-grup-zionis-as-di-balik-keputusan-trump-soal-yerusalem-cBzo>
- Hasan, A. M. (2017, Desember 12). *Lobi Grup Zionis AS di Balik Keputusan Trump soal Yerusalem*. Dipetik Mei 5, 2018, dari Tirto.id: <https://tirto.id/lobi-grup-zionis-as-di-balik-keputusan-trump-soal-yerusalem-cBzo>
- Hasan, A. M. (2017, Desember 12). *Lobi Grup Zionis AS di Balik Keputusan Trump soal Yerusalem*. Dipetik Mei 5, 2018, dari Tirto.id: <https://tirto.id/lobi-grup-zionis-as-di-balik-keputusan-trump-soal-yerusalem-cBzo>
- Hutagalung, E. (t.thn.). *Ermawati 1170750020-Hubungan Internasional Perbandingan Politik*. Dipetik Februari 3, 2019, dari Academia.edu: Ermawati 1170750020-Hubungan Internasional Perbandingan Politik
- Junaedi, F. (2010). Relasi Terorisme dan Media. *Jurnal ASPIKOM Vol 1, No. 1*, 17-18.
- KBBI. (2019). *Antisemitisme*. Dipetik Maret 13, 2019, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/antisemitisme>
- Kompas.com. (2017, Januari 16). *Ini Akibatnya jika Kedubes AS Pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem*. Dipetik Mei 2, 2018, dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2017/01/16/19174901/ini-akibatnya-jika-kedubes-as-pindah-dari-tel-aviv-ke-yerusalem>

- Marniati. (2018, Januari 19). *AS Percepat Pemindahan Kedutaan Besar ke Yerusalem*. Dipetik Februari 5, 2019, dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/18/01/19/p2t2bv415-as-percepat-pemindahan-kedutaan-besar-ke-yerusalem>
- Marniati, K. D. (2018, Maret 7). *Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem dan Faktor Iran*. Retrieved April 7, 2019, from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/18/03/07/p5743s440-pemindahan-kedubes-as-ke-yerusalem-dan-faktor-iran>
- Mata Mata Politik. (2017, Desember 7). *Apa Arti Pemindahan Kedutaan Besar Amerika ke Yerusalem bagi Rakyat Palestina?* Retrieved Februari 5, 2019, from Mata Mata Politik: <https://www.matamatapolitik.com/apa-arti-pemindahan-kedutaan-besar-amerika-ke-yerusalem-bagi-rakyat-palestina/>
- Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2010). *dahsyatnya Lobi Israel*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Metra, W. (2018, Agustus 31). *HOLOCAUST PERSPEKTIF MAHMOUD AHMADINEJAD “KONFERENSI TINGKAT TINGGI PEMBANTAHAN HOLOCAUST DI IRAN”*. Retrieved Maret 13, 2019, from Repository UNPAS: <http://repository.unpas.ac.id/35869/>
- Middle East Explorer. (2019). *American Israel Public Affairs Committee*. Dipetik Maret 13, 2019, dari Middle East Explorer: <http://middleeastexplorer.com/Israel/American-Israel-Public-Affairs-Committee>
- Nownes, A. J. (2016). *Total Lobbying, What Lobbyists Want (And How They Try To Get It)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurdi, H. (2006). *Lobi Zionis dan Rezim Bush*. Jakarta: Hikmah.
- Plitnick, M. (2016, Maret 24). *How Donald Trump Exposed AIPAC*. Dipetik Juli 9, 2019, dari New Republic: <https://newrepublic.com/article/131994/donald-trump-exposed-aipac>
- Restad, H. E. (2012). Old Paradigms : in History Die Hard in Political Science : US Foreign Policy and American Exceptionalism. *The University of Chicago Press Journals*, 56.
- Rossenau, J. N. (1997). *International Politic and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. New York: Macmillan Publishing.
- Sari, A. P. (2016, Maret 22). *Pentingnya Pelobi Yahudi AIPAC dalam Pemilu Presiden AS 2016*. Dipetik Februari 6, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160322153836-134-119081/pentingnya-pelobi-yahudi-aipac-dalam-pemilu-presiden-as-2016>

- Sarwono, S. W. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satnyoto, A. (2017). Perspektif Teori Institusionalisme dan Teori Kritis terhadap Rezim Internasional Lingkungan. *Jurnal Interdependence Hubungan Internasional Vol. 5 No. 2*, 98-103.
- Setiowati, S. P. (2009, April 6). *Kontribusi AIPAC Pada Bush Dalam Pemilu Presiden Tahun 2004*. Dipetik Oktober 17, 2017, dari Repository UMY: <http://thesis.umy.ac.id/temp/17101727ab6da54ce53defea911a680dabc68a4.pdf>
- Shapiro, D. B. (2018, Mei 8). *What everyone's getting wrong about the U.S. Embassy move to Jerusalem*. Retrieved 4 Juni, 2019, from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/05/08/what-everyones-getting-wrong-about-the-u-s-embassy-move-to-jerusalem/?noredirect=on&utm_term=.0669f0a6c641
- Share America. (2017, Desember 7). *What is the Jerusalem Embassy Act? And what's next for the U.S. Embassy?* Retrieved April 4, 2019, from Share America: <https://share.america.gov/whats-next-for-u-s-embassy-in-israel/>
- Siadari, H. N. (2013, Mei 27). *Peran AIPAC terhadap Kemenangan Presiden Barack Obama pada Pemilihan Umum tahun 2008*. Dipetik Oktober 17, 2017, dari Repository UNRI: <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3969/jurnal%20Heny.pdf?sequence=1>
- Sona, A. D. (2011, Juli 19). *Repository UMY*. Dipetik Februari 2, 2019, dari Peran Amerika Serikat dalam Menjaga Harmoni Hubungan Mesir-Israel (1979-2011): <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/602/bab%20ii.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Sugiri, G. (2016, September 30). *PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGES (UNHCR) DALAM MENANGANI IMIGRAN ILEGAL DI INDONESIA*. Dipetik Oktober 14, 2018, dari Repository UNPAS: <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13447>
- Suhardono, E. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sullivan, L. E. (2009). *The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences*. Lonon: SAGE Publications Ltd.
- The Algemeiner. (2017, Agustus 7). *53 US Lawmakers Visiting Israel in August*. Dipetik Juli 9, 2019, dari The Algemeiner: <https://www.algemeiner.com/2017/08/07/53-us-lawmakers-visiting-israel-in-august/>

- The White House. (2017, Juni 1). *Presidential Memorandum for the Secretary of State*. Retrieved Juli 9, 2019, from The White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-state/>
- The White House. (2017, Desember 6). *Presidential Proclamation Recognizing Jerusalem as the Capital of the State of Israel and Relocating the United States Embassy to Israel to Jerusalem*. Dipetik Juni 27, 2019, dari The White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-recognizing-jerusalem-capital-state-israel-relocating-united-states-embassy-israel-jerusalem/>
- The White House. (2017, Juni 1). *Statement on the American Embassy in Israel*. Retrieved Juni 4, 2019, from The White House: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-american-embassy-israel/>
- The White House. (2017, Desember 7). *Support For President Trump's Decision To Recognize Jerusalem As Israel's Capital*. Dipetik Juli 3, 2019, dari Support For President Trump's Decision To Recognize Jerusalem As Israel's Capital: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/support-president-trumps-decision-recognize-jerusalem-israels-capital/>
- The White House. (2018, Mei 14). *President Donald J. Trump Keeps His Promise To Open U.S. Embassy In Jerusalem, Israel*. Dipetik Juni 22, 2019, dari The White House: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-keeps-promise-open-u-s-embassy-jerusalem-israel/>
- The White House. (2018, Mei 7). *President Trump Announces Presidential Delegation to the State of Israel to Attend the Opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel*. Dipetik Juni 25, 2019, dari The White House: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trump-announces-presidential-delegation-state-israel-attend-opening-united-states-embassy-jerusalem-israel/>
- The White House. (2018, Juni 4). *Presidential Memorandum for the Secretary of State*. Retrieved Juli 9, 2019, from The White House: <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-secretary-state-11/>
- The White House. (2018, Maret 5). *Remarks by Vice President Pence at the AIPAC Policy Conference*. Dipetik Juni 26, 2019, dari The White House: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-aipac-policy-conference/>

- Tillerson, R. (2017, Desember 7). What is the Jerusalem Embassy Act? And what's next for the U.S. Embassy? (S. America, Interviewer)
- Timmons, H. (2017, Desember 8). *The billionaires, lobbyists, and Christian extremists behind Trump's Jerusalem move*. Dipetik Juli 9, 2019, dari Quartz: <https://qz.com/1148673/trumps-jerusalem-move-is-backed-by-billionaires-lobbyists-and-evangelicals/>
- Universitas Brawijaya. (2012, Januari 7). *Politik dan Hubungan Internasional*. Dipetik Februari 3, 2019, dari Kelompok Kepentingan (Interest Groups): <https://blog.ub.ac.id/nunungnasikhah/kelompok-kepentingan/>
- US Congress. (2017, Januari 4). *H.R.257 - Recognition of Jerusalem as the Capital of the State of Israel Act*. Dipetik Juni 27, 2019, dari US Congress: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/257?q=%7B%22search%22%3A%5B%22israel%22%5D%7D&r=7>
- US Congress. (2017, Januari 3). *S.11 - Jerusalem Embassy and Recognition Act*. Dipetik Juni 27, 2019, dari US Congress: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/11/text>
- US Congress. (2017, Mei 17). *S.Res.167 - A resolution relating to the recognition of Jerusalem as the capital of Israel and the relocation of the United States Embassy to Jerusalem*. Retrieved Juli 9, 2019, from Congress.gov: <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-resolution/167?q=%7B%22search%22%3A%5B%22embassy%22%5D%7D&r=5>
- VOA Indonesia. (2017, Januari 18). *Profil Donald Trump*. Dipetik Juli 2, 2019, dari VOA Indonesia Januari: <https://www.voaindonesia.com/a/profil-donald-trump/3680260.html>
- Waxman, O. B. (2017, Desember 5). *The 1995 Law Behind President Trump's Plan to Move the U.S. Embassy in Israel to Jerusalem*. Retrieved April 7, 2019, from Time: <http://time.com/5049019/jerusalem-embassy-history/>
- Wibowo, E. (2004). Ilmu Politik Kontemporer. Yogyakarta: YPAPI.
- Windham, M. (2010). *AIPAC Organisasi Paling Berbahaya Di Dunia*. Yogyakarta: Pustaka Solomon.
- Yasinta, V. (2018, Januari 18). *Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem Tidak Bisa Tahun Ini*. Dipetik Februari 5, 2019, dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/18/09241161/pemindahan-kedubes-as-ke-yerusalem-tidak-bisa-tahun-ini>

Zubir, M. (2011, November 7). *Pengaruh American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Invasi Amerika Serikat ke Irak Pada Tahun 2003*. Dipetik Februari 2, 2019, dari Repository UIN Jakarta: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24180/1/Muhammad%20Zubir.pdf>